

**ANALIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PALEMBANG DALAM MEMBIAYAI PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 2007**

SKRIPSI



**Nama : Mayusa
NIM : 222014049**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

SKRIPSI

**ANALIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PALEMBANG DALAM MEMBIYAI PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 2007**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Mayusa
NIM : 222014049**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayusa
Nim : 222014049
Program Study : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembetulan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2019
Yang membuat pernyataan,


(Mayusa)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
Kota Palembang Dalam Membiayai Pembangunan
Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007
Nama : Mayusa
NIM : 222014049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Februari 2019

Pembimbing I,



Rosalina Ghazali, Hj. S.E.AK, M.Si
NIDN/NBM : 0223115802/1021961

Pembimbing II,



Welly, S.E.AK, M.Si, CA
NIDN/NBM:0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
u.bKetua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E.Ak, M.Si, CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007. sebagaimana diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Skripsi ini berjudul “Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007” penulis bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan; bab kajian kepustakaan, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab simpulan dan saran. Pada penulisan skripsi ini, penulis sudah melakukan semaksimal mungkin mencurahkan kemampuan yang dimiliki, tetapi tanpa adanya saran, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada kedua orang tua (Ayahanda Siro dan Ibunda Atika) yang dengan senantiasa selalu memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materil yang memiliki makna yang besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Rosalina Ghazali, Hj. S.E.AK, M.SI., selaku pembimbing 1 dan ibu Welly, S.E.,M.Si selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai pada penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli,S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin,S.E.,Ak.,M.Si.,CA dan Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Dan Seketaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Darma Yanti,S.E.,Ak.,M.M selaku pembimbing akademik paket 12 akuntansi.
5. Bapak dan ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Pimpinan dan karyawan dispenda yang sudah berbaik hati memberikan izin penelitian

7. Seluruh teman-teman yang bersangkutan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan, amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin

Wasaalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 2019
Penulis,

Mayusa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pendapatan Asli Daerah	12
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	12
2. Instrument Pendapatan Asli Daerah.....	19
3. Pembiayaan Pembangunan Daerah	20
4. Hasil Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Pembangunan Daerah.....	23
B. Penelitian Sebelumnya	28

BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Operasionalisasi Variabel.....	30
D. Data yang Diperlukan	31
E. Metode Pemilihan Data.....	31
F. Analisis Data Dan Teknik Analisis Data	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum.....	34
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	34
2. Visi Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	35
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	36
4. Pembangian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	37
B. Hasil Penelitian	40
1. Hasil Penelitian Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	40
a. Hasil Pajak Daerah.....	40
b. Hasil Retribusi Daerah.....	47
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan	55
d. Hasil Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian	61
1. Pembahasan Hasil Penelitian Pajak Daerah.....	61
2. Pembahasan Hasil Penelitian Retribusi Daerah	65
3. Pembahasan Hasil Penelitian Kekayaan Yang Dipisahkan	69
4. Pembahasan Hasil Penelitian Pendapatan Lainnya Yang Sah	71
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	78

Abstrak

Mayusa/222014049/2018/Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan daerah kota Palembang berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sumber-sumber pendapatan asli daerah kota Palembang dalam membiayai pembangunan daerah kota Palembang berdasarkan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2007. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dibuat tabel sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tertuang dalam peraturan daerah. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa penyebab dari ketidaktercapaian antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditentukan ialah su bagian dari masing-masing sumber pendapatan asli daerah, dan banyak dari sub bagian sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tidak di umgkapkan, seperti pajak sumber pendapatan asli daerah ini realisasi penerimaanya selalu mencapai target dikarenakan setiap dari sub bagian sumber realisasinya lebih tinggi dari pada target yang telah di tentukan dan setiap jenis bagian pajak di pungut secara teliti, sedangkan sumber pendapatan asli daerah seperti retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lainnya yang sah setiap bagian dari sumber tersebut tidak di pungut secara keseluruhan masih ada sub bagian yang tidak terdapat dalam hasil pemungutan serta realisasi setia bagian selalu lebih kecil dari target yang telah ditentukan inilah yang menyebabkan total penerimaan jauh lebih rendah dari target, sehingga seharusnya dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah kota Palembang tidak seharusnya meningkat dengan jumlah sumber pendapatan asli daerah yang menurun.

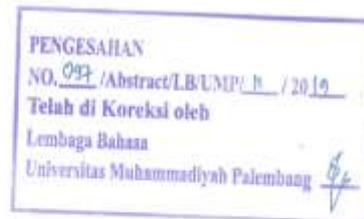
Kata Kunci : Sumber-Sumber PAD, Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah.

Abstract

Maynisa/222014/2018/An Analysis of Regional Original Source of Revenue in Financing the Regional Development of Palembang City Based on the Regional Regulation of Palembang City Number 2 of 2007.

This research was formulated on how the sources of local revenue in financing the development of the city of Palembang based on Palembang city regulation number 2 in 2007 were. This research was aimed at analyzing the sources of indigenous revenue in Palembang in financing the development of developing urban areas based on Palembang city regulation number 2 in 2007. The type of the research was a descriptive research. The analysis technique used was a qualitative analysis technique by describing the data presented with table in accordance with the actual conditions contained in the regional regulations. The results show that the cause of the inaccessibility between the realization of revenue and the predetermined target was a part of each source of local revenue, and many of the sub-sections of local revenue sources were not disclosed, such as original income source tax this area of realization of recipients always reached the target because each of the sub-sections of the source of realization was higher than the target that had been determined and each type of part of tax was carefully collected, while sources of local revenue such as regional levies, separated assets and other legitimate income every part of the source was not collected as a whole, there were still sub-sections that were excluded as results of the collection and the loyal realization of the part was always smaller than the predetermined target, which causes the total revenue to be lower than the target. To finance the development of the area of the city of Palembang should not increase with the number of local revenue sources declining.

Keywords: PAD Sources, Regional Development, Regional Regulations.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi untuk suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan dan kebijakan yang dapat berpengaruh kepada kemajuan daerah, salah satu bentuk otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri keuangan daerahnya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi dari otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya di sebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Carunia, 2017: 118-119)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 118-119).

Pajak daerah merupakan kewajiban penduduk atau masyarakat untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman semakin besar pajak daerah yang diterima maka akan semakin besar pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari pajak daerah. Retribusi daerah merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang merupakan hasil dari perusahaan milik daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah (Peraturan Daerah, 2007)

Pembiayaan pembangunan daerah biasanya berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lainnya, dari setiap peningkatan yang berasal sumber-sumber pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, akan tetapi jika dana yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan asli daerah mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan apa yang di targetkan maka dana yang digunakan untuk pembangunan daerah pun akan berkurang. Penerimaan pendapatan asli daerah terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah ini dikarenakan jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan dengan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lainnya (Raharjo, 2014: 33-54)

Setelah berakhirnya era booming minyak yang menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan maka pemerintah memutuskan untuk menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah khususnya pendanaan dari perpajakan (Raharjo, 2017: 77).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengolah sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan perkembangan kegiatan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) di suatu wilayah. Pada hakekatnya inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkaitan pada dua hal yaitu

pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Raharjo, 2017: 20-21).

Peraturan daerah kota Palembang Nomor 2 tahun 2007 merupakan peraturan yang membahas tentang peningkatan pembangunan daerah kota Palembang yang dibiayai oleh pendapatan daerah, di dalam pendapatan daerah yang bersumber dari tiga pendapatan salah satunya yaitu pendapatan asli daerah kota Palembang. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 merupakan pengganti dari peraturan yang sebelumnya berlaku yaitu peraturan daerah nomor 2 tahun 2002, peraturan daerah yang membahas tentang pendapatan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dari peraturan nomor 2 tahun 2002 menjadi peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 di dukung oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah perlu meninjau dan memperbaharui peraturan daerah kota Palembang no 2 tahun 2002.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari badan pusat statistik mengenai pembangunan daerah kota Palembang yang dibiayai dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) mengalami ketidaktercapaian antara realisasi dan target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun sedangkan progress pembangunan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terutama pembangunan daerah pada saat Asian games.

Kota Palembang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah kota

medan, kota Palembang mempunyai luas wilayah 358,55 KM², yang dihuni 1,7 juta orang dan mempunyai kepadatan penduduk 4.800 per KM². Pemerintah daerah kota Palembang memiliki program kerja kota Palembang dari salah satu program tersebut, yaitu peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kota Palembang. Pembangunan di kota Palembang sejak tahun 2015-2017 telah di persiapkan guna mengukung Asian games pada tahun 2018, seperti dilansir oleh pemerintah daerah kota Palembang bahwa pemerintah daerah akan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata dan Asian games.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa pembangunan tahun 2015-2018 merupakan bagian integral dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam penyusunan Rancangan Daerah dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Palembang. Kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan seperti pembangunan infrastruktur jembatan musu IV dan VI, Pembangunan LRT, Fly over bandara dan kramasan, penataan kawasan Jl. Sudirman dari simpang charitas, penataan benteng kuto besak dan 16 ilir serta kegiatan penanganan genangan melalui pompa bendungan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pendapatan daerah kota Palembang, data yang diperoleh dari BPKAD, dan data yang di peroleh dari badan pusat statistiK kota Palembang dari tahun 2015- 2017.

Tabel I.1
Target Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palembang
Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan lainnya yang dipisahkan	Pendapatan Lainnya
2015	478.025.367.500	86.108.011.133	36.279.541.543	149.131.261.844
2016	526.867.498.866	106.582.011.666	52.950.000.000	154.172.795.566
2017	538.549.551.000	101.707.504.048	64.452.894.174	294.599.018.618

Sumber, penulis (2018)

Tabel I.2
Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Palembang
Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan lainnya yang dipisahkan	Pendapatan Lainnya
2015	479.112.899.223	75.646.654.675	34.503.218.051	147.663.733.978
2016	536.552.681.049	75.946.671.693	50.362.039.101	118.485.543.871
2017	680.012.752.910	59.805.578.186	61.860.027.525	290.026.147.232

Sumber, penulis (2018)

Tabel I.3
Persentase dana Pembangunan Daerah Kota Palembang
Tahun 2015-2017

Tahun	Persentase Pembangunan Daerah
2015	30,35 %
2016	30,8%
2017	32,14 %

Sumber, penulis (2018)

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah antara hasil realisasi dengan penerimaan yang sudah ditargetkan tidak

tercapai , ketidaktercapaian antara hasil realisasi dengan target yang telah ditetapkan di akibatkan oleh kurangnya penerimaan dari berbagai sub sektor PAD, pada sub sector retribusi daerah total penerimaan pada tahun 2015 tidak sama dengan target yang ditetapkan dikarenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.12.628.00,00 atau setara dengan 27,26% dari total penerimaan umum, retribusi pengantian cetak juga hanya menerima sebesar Rp 118.430.000,00 atau setara dengan 47,37% dari penerimaan tata kota, retribusi izin mendirikan bangunan juga mengalami ketidaktercapaian karena penerimaan retribusi hanya sebesar Rp. 42.130.294.516 atau setara dengan 78,56% dari penerimaan tata kota, retribusi parkir juga hanya menerima sebesar Rp. 6.713.224.000 atau setara dengan 92,70% dari penerimaan dinas perhubungan, retribusi kendaraan bermotor juga mengalami ketidaktercapaian antara realisasi dan target, penerimaannya hanya sebesar Rp. 3.519.021.580 atau setara dengan 68,90% dari penerimaan dinas perhubungan, retribusi yang berasal dari penerimaan terminal juga mengalami ketidaktercapaian karena penerimaan retribusi hanya sebesar Rp. 2.371.246.000 atau setara dengan 96,70% dari penerimaan dinas perhubungan.

Pada tahun 2016 dan 2017 sub sektor retribusi daerah yang sama kembali mengalami ketidaktercapaian antara realisasi dan target yang telah ditetapkan, ketidaktercapaian pada tahun 2016-2017 jauh lebih besar. Penerimaan retribusi di berbagai sub sektor yang tidak tercapai diakibatkan

berbagai factor seperti pada peraturan daerah yang menjelaskan bahwa retribusi daerah dipungut secara seksama pada setiap sektornya.

Pada sumber PAD seperti kekayaan yang sah sub sektor yang mengalami ketidaktercapaian antara target dan retribusi pada tahun 2015-2016 yaitu bank pembangunan daerah pada tahun 2015 yang hanya menerima realisasi sebesar Rp 4.280.872.330, atau setara dengan 70, 15% dan Rp. 5.278.541.342.00 atau setara dengan 90 % di tahun 2016. Pada tahun 2017 ketidaktercapaian terjadi pada sub sektor PD pasar yang hanya menerima realisasi sebesar Rp. 227.000.115 atau setara dengan 11,00%.

Pada sub sektor pendapatan lainnya dari tahun 2015-2017 yang mengalami ketidaktercapaian antara realisasi dengan target adalah jasa giro kas daerah yang hanya menerima sebesar Rp. 3.456.593.667 atau setara dengan 42,20%, pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan sebesar Rp. 163.215.835 atau setara dengan 11,44%, pada pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran tidak ada penerimaan sama sekali di tahun 2015 atau setara dengan 0%, serta penerimaan lain-lain hanya mendapatkan realisasi sebesar Rp. 11.960.941.661,09 atau setara dengan 41,28%.

Total penerimaan pada setiap sub sektor PAD yang mengalami ketidaktercapaian inilah yang mengakibatkan dana yang digunakan untuk pembiayaan daerah berkurang sedangkan dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah harus sebesar 70% dari yang telah ditargetkan pemerintah daerah, akan tetapi pembangunan daerah dari tahun ke tahun justru mengalami peningkatan inilah yang menimbulkan kesenjangan

teori antara data yang di peroleh dengan teori yang ada. Tidak tercapainya realisasi penerimaan PAD yang berasal dari sumber-sumber PAD akan menyebabkan pengurangan dana yang terjadi untuk membiayai pembangunan daerah, hal ini dikarenakan PAD memegang peranan besar dalam membiayai pembangunan daerah.

Pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lainnya merupakan sumber PAD yang paling besar, akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh sumber-sumber penerimaan tersebut justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang menyatakan bahwa otonomi yang merupakan bentuk dari desentralisasi yang ditandai dengan adanya wewenang dari pemerintah daerah yang menetapkan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembangunan daerah tidak sesuai dengan hasil data yang diperoleh, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah adalah Bagaimanakah Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimanakah Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007.

2. Bagi Kota Palembang

Diharapkan dapat memberikan saran yang membangun terkait dengan pembangunan daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.

3. Bagi almamater

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait dengan Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 dan dapat memberikan gambaran bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Akuarista Arum dan Masdjojo Gregorious. (2012). Kajian pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupate atau kota sejawa tengah periode 2008-2012. *Jurnal ekonomi*. Vol.8, ISBN978-979-3649-81-8, Diakses 5 November 2018.
- Baldric, Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN
- Bhakti, Abby, Moh Utama. (2018). Analisis pembangunan infrastruktur daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi*.(online), vol.6, issn 411-1438, Diakses 8 November 2018. (<https://dspace.uli.ac.id>)
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jolianis. (2012). Analisis perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten atau kota di provinsi sumatera barat. *Juornal Economic*. (online).Vol. 1 No,1, Diakses 8 November 2018.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Alfabeta
- Perda, (2007). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 (Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Diakses 5 november 2018).
- Phaureula, artha Wulandari dan Iryanie Emy. (2017). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sleman: Depublish.
- Sianturi Anastasia. (2014). Peran pendapatan asli daerah dalam menunjang desentralisasi fiskal demi pembangunan daerah (studi pada dinas pendapatan kota batu). *Jurnal administrasi public*. (online). Vol.2 No3. Diakses 8 November 2018.
- Simbolon Ramadona dan Erviani Sri. (2017). Analisis pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah sumatera utara. *Jurnal ekonomi*. (online). Vol.XV No.1, Diakses 7 November 2018.

Sugiyono, (2016). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suliyanto, (2016). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Rajawali Pers.

Taufik dkk. (2009). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kota Makasar. *Jurnal Ekonomi*. (online). Diakses 15 Desember 2018.